



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
STUDI KELAYAKAN DOKUMEN RANCANG LANDSCAPE

2024

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT. 001/RW. 001, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122
Tlp. (0251) 8338052, website:www.bappeda.kotabogor.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor SOP	: SOP/LITBANG.3/004
Lintas Fungsi Peta Proses Bisnis	: Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Aktifitas Lintas Fungsi	: Melaksanakan penyusunan kajian sektor Sosial dan Kependudukan
Tgl. Pembuatan	: 03 Januari 2024
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 03 Januari 2024
Disahkan oleh	: <p align="center">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor</p>  <small>Y. Mashudi, S.T., M.P. NIP. 197707062006041018</small>
Judul SOP	: STUDI KELAYAKAN DOKUMEN RANCANG LANDSCAPE

DASAR HUKUM















1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
8. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal lulusan S1
2. Memahami Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
3. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah dan kelitbang
5. Memahami Implementasi data dan informasi secara elektronik
6. Penguasaan pemahaman tentang Sosial Budaya dan Pemerintahan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor 14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan,Riset Dan Inovasi	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Pengadaan (PBJ) 2. SOP Pengendalian Arsip	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Internet 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak terselenggaranya Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape secara optimal sehingga organisasi tidak mendapatkan hasil studi kelayakan yang mendalam dari Dokumen Rancang Landscape	1. SK Tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape 2. KAK Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape 3. Dokumen Studi Kelayakan Kampung Tematik

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Analisis Litbang Sosbudpem	Analisis Kebijakan	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Tim Kerja Pelaksana Kajian	PPK	Mitra Kerja	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyiapkan draft SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape								ATK, komputer, printer	30 menit	Draft SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape	
2	Memeriksa dan memparaf SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape								Draft SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape	15 menit	Draft SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape	
3	Memeriksa dan memparaf SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape								Draft SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape	15 menit	Draft SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape	
4	Menandatangani SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape								Draft SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape	15 menit	SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape	
5	Menyusun KAK Studi Kelayakan Rancang Lanscape								SK tim Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape	1500 menit	KAK Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape	
6	Menjabarkan pelaksanaan KAK Studi Kelayakan Rancang Lanscape								KAK Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape	1500 menit	Penjabaran Pelaksanaan KAK	
7	Menentukan jenis pelaksanaan kajian								Penjabaran Pelaksanaan KAK	300 menit	Jenis Pelaksanaan Kajian (SIRUP)	
8	Menentukan mitra kerja pelaksanaan kajian								Jenis pelaksanaan kajian	1500 menit	Penetapan mitra kerja	SOP Pengadaan (PBJ)

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Analisis Litbang Sosbudpem	Analisis Kebijakan	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Tim Kerja Pelaksana Kajian	PPK	Mitra Kerja	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Mensosialisasikan rencana kampung tematik								Penetapan mitra kerja	1500 menit	Sosialisasi	
10	Menggali potensi di suatu daerah/ kampung								Sosialisasi	1500 menit	Potensi Daerah	
11	Melakukan konfirmasi atau survey lapangan untuk memastikan peluang menjadi unggulan daerah tersebut								Potensi Daerah	1500 menit	Hasil survey lapangan	
12	Mencari informasi tentang lokasi atau lahan kampung tematik								Hasil survey lapangan	1500 menit	Lokasi kampung tematik	
13	Menyusun dokumen studi kelayakan kampung tematik								Lokasi kampung tematik	3 Bulan	Dokumen studi kelayakan kampung tematik	
14	Mensosialisasikan dokumen studi kelayakan kampung tematik								Dokumen studi kelayakan kampung tematik	300 menit	Sosialisasi	
15	Mendokumentasikan dan menyimpan rekaman kegiatan Penyusunan								Rekaman Studi Kelayakan Dokumen Rancang Landscape dan program	30 menit	Dokumentasi dan arsip	SOP pengendalian arsip